1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. **Perkembangan Inflasi Juli 2026**

    Pada bulan Juli 2026 terjadi Inflasi y-to-y Kabupaten Lampung Timur sebesar 1,45 % dengan IHK sebesar 114,36. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) bulan Juli 2026 sebesar 1,06 persen dan inflasi year to date (y-to-d) bulan Juli 2026 sebesar 0,97 persen. Inflasi y-on-y (year-on-year) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,78 persen; kelompok pakaian dan alas kaki

    sebesar 6,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,46 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,35 persen; kelompok transportasi sebesar 6,33 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,79 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,28 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,02 persen. Selanjutnya, terdapat satu kelompok yang mengalami deflasi y-on-y yaitu kelompok pendidikan sebesar 26,95 persen. kelompok pengeluaran yang memberikan andil/ sumbangan deflasi y-on-y pada Juli 2026 adalah: kelompok pendidikan sebesar 1,10 persen. Selanjutnya, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak memberikan andil inflasi maupun deflasi y-on-y.

    2. Perkembangan Inflasi Agustus 2026

    Pada bulan Agustus 2026, di Kabupaten Lampung Timur terjadi inflasi *m-to-m* sebesar **0,23%,** inflasi *years on years* sebesar **2,90%** dan inflasi *years to date* sebesar **1,20%**.

    Tingkat inflasi month to month (m-to-m) bulan Agustus 2026 sebesar 0,23 persen dan Inflasi y-on-y (year-on-year) 2,90% terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 6,81 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,92 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,05 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,35 persen; kelompok transportasi sebesar 7,84 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,11 persen ;kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,94 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,62 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,19 persen.

    2. Perkembangan Inflasi September 2026

    Pada September 2026 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,00 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 114,52. Tingkat deflasi m-to-m sebesar 0,09 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,11 persen. Inflasi y-on-y (year-on-year) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,52 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar

0,16 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,09 persen; kelompok transportasi sebesar 0,73 persen; kelompok informasi, komunikasi dan keuangan sebesar 0,01%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,05 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,53 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga

Terdapat fluktuasi harga bahan pokok dan penting yang disebabkan permintaan masyarakat yang meningkat yang berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan. Selain itu terjadi kenaikan harga bahan pokok pangan yang disebabkan oleh penyesuaian harga BBM jenis pertamax menjadi Rp. 16.250,- dari harga sebelumnya Rp. 12.300,- per liter yang berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan-bahan pokok lainnya, selain penyesuaian harga BBM non subsidi juga terjadi kelangkaan dan antrian Panjang di beberapa SPBU yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap ongkos angkut dan ketepatan waktu pengiriman. Untuk itu dilakukan Upaya yang berkaitan dengan pengendalian harga melalui kegiatan Gerakan Penetrasi Pasar, Operasi Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, dan Gerakan serentak Operasi Pasar Minyak Goreng. Selain itu TPID juga melakukan sidak pemantauan terhadap kenaikan harga yang terjadi dan memastikan bahwa kenaikan harga tidak melebihi HET dan HAP yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Ketersediaan Pasokan

Dampak kekeringan yang terjadi akibat El-Nino Godzila mengalami puncak kekeringan dibulan juli-agustus berpengaruh terhadap sektor pertanian, dari 264 desa di lampung Timur, 9 desa diantaranya masuk kedalam kategori sangat rentan yang berpengaruh terhadap penurunan produksi padi. dalam mendukung program ketahanan pangan dan menyukseskan musim tanam dalam rangka meningkatkan ketersediaan pasokan, TPID Lampung Timur melalui Dinas KPTPHP menyerahkan bantuan benih padi kepada petani yang berhak. TPID Lampung Timur melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog melakukan aksi nyata dengan gerakan serentak penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat di kabupaten Lampung Timur, melakukan gerakan tanam serempak 50.000 Ha di Kabupaten Jabung dalam rangka memperkuat ketahanan dan swasembada pangan, Pemkab Lampung Timur juga bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 1.480 Ha di Kabupaten lampung Timur. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga berupaya dalam memperbaiki jaringan irigasi yang rusak yang sudah mencapai 100% perbaikan, dan melakukan peninjauan embung cadangan irigasi dalam menghadapi kemarau panjang.

3. Kelancaran Distribusi

Masuknya Kebutuhan Pangan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Timur sebagian didatangkan dari luar baik Kabupaten Lampung Timur, seperti cabai dan bawang merah serta kebutuhan pokok lainnya baik yang masuk maupun yang didistribusikan keluar kabupaten mempengaruhi harga bahan pokok yang bila terjadi permasalahan ataupun hambatan dalam kelancaran transportasi ini sangat berpengaruh terhadap harga bahan pokok yang cenderung meningkat. Dalam mengatasi permasalahan ini TPID Kabupaten Lampung Timur melalui

Dinas PUPR melakukan perbaikan jalan pada ruas-ruas jalan kabupaten.

4. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif antar OPD terkait perlu ditingkatkan sehingga sinergisitas dalam upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan secara terpadu dan juga fasilitasi kerja sama antar daerah dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan penting dengan Kabupaten Lampung Tengah, Pemkot Metro dan Pemkot Bandar Lampung yang telah terjalin. Untuk memastikan kebutuhan masyarakat di Kabupaten lampung Timur terpenuhi. Serta perlu diperluas kerjasama dengan kabupaten lainnya

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan langkah konkret dengan strategi 4 K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan; Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang dilakukan yaitu:

1. Keterjangkauan harga
   - Pemantauan harga secara lebih intensif melalui data harian dari 9 pasar Daerah yang ada di Kabupaten Lampung Timur (Pasar Way Jepara, Sekampung, Purbolinggo, Pekalongan, Labuhan Ratu, Sukadana, Raman Utara, Labuhan Maringgai dan Melinting) yang dilakukan TPID melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga dinas ketahanan pangan TPH dan Perkebunan
   - Koordinasi dengan SPBE dalam rangka mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan LPG
   - Melakukan sidak pasar terhadap harga bahan pokok agar tidak terjadi lonjakan harga serta penimbunan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
   - Memantau pergerakan harga, melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon atas perubahan harga dengan memperbaiki kualitas data dan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta OPD terkait serta Badan Pusat Statistik
   - Melaksanakan Gerakan Serentak Operasi Pasar Minyak Goreng di pasar-pasar pantauan SP2KP dan pasar penialaian BPS di Kabupaten Lampung Timur
   - Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) , Operasi Pasar Murah, Gerakan Penetrasi Pasar
   - Melakukan rapat teknis percepatan pendirian Toko Inflasi

2. Ketersediaan Pasokan

   - Mendorong OPD terkait untuk memperhatikan pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat struktural, seperti penurunan biaya operasional dengan memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah
   - Memperkuat Kelembagaan petani melalui Gapoktan serta usaha-usaha tani dalam pemenuhan ketersediaan pangan

Memberikan bantuan bibit Bawang kepada petani Bawang di Kecamatan Pekalongan dan melakukan pendampingan pada saat panen untuk memenuhi kebutuhan Bawang di Kabupaten Lampung Timur
- Memberikan bantuan benih padi kepada Petani yang berhak
- Memberikan bantuan pangan melalui Cadangan Pasokan Pemerintah di kecamatan-kecamatan Lampung Timur
- Memastikan ketersediaan pasokan di Gudang yang dikoordinasikan oleh BULOG Sub Drive Lampung Tengah, melakukan koordinasi untuk memastikan kembali kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok di di wilayah kecamatan se kabupaten Lampung Timur
- Koordinasi dengan Bulog serta Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan untuk antisipasi ketersediaan bahan pokok terutama beras serta penyerapan padi di Kabupaten Lampung Timur dengan harga padi Rp. 6.500,00
- Melakukan pemantauan terhadap stok Gas LPG agar tidak terjadi kelangkaan
- Mensupport petani lokal dalam budidaya seledri hidroponik untuk memenuhi kebutuhan MBG

3. Kelancaran Distribusi

- Mendorong perdagangan antar daerah dalam rangka menjaga pasokan komoditas pangan di daerah, serta membangun dan mensinkronkan pasar-pasar pengumpul untuk memperluas akses pasar petani dan mengefisienkan rantai distribusi seta meningkatkan Infrastruktur Perdagangan;
- Pengawalan dalam pemberian bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, tidak hanya dari sisi daftar penerima bantuan melainkan juga mekanisme penyaluran dan ketersediaan pasokan komoditasnya agar tidak mendorong kenaikan harga.
- Pemantauan harga secara lebih intensif melalui data harian pasar Daerah yang ada dan melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
- Pasar Daerah yang menjadi pantauan adalah Pasar Way Jepara, Sekampung, Purbolinggo, Pekalongan, Lab. Ratu, Sukadana, Raman Utara, Lab. Maringgai dan Melinting
- Melakukan perbaikan jalan ruas kabupaten dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka percepatan perbaikan jalan ruas provinsi yang melewati daerah Lampung Timur

4. Komunikasi Efektif

- Mendorong OPD terkait yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebuann untuk efektivitas percepatan realisasi APBD, termasuk melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi harga;
- Mengantisipasi disparitas harga komoditas antara periode panen yang rendah dengan periode tanam yang tinggi serta jumlah permintaaan masyarakat pada bulan-bulan tertentu khususnya menjelang hari-hari besar;
- Melakukan himbauan untuk berbelanja secara bijak disampaikan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga ekspektasi positif bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga
-

dengan melakukan operasi pasar.
    - Melakukan himbauan gerakan menanam cabai rawit di pekarangan kantor
    - Melalui Bulog Kerjasama dengan Toko penyedia sembako untuk Rumah Pangan Kita.
    - Melaksanakan Rapat Koordinasi serta HLM yang didukung juga oleh Bank Indonesia sebagai upaya melakukan pengendalian harga dan meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah yang masuk dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
    - Memfasilitasi penyerapan padi pasca panen raya bekerjasama dengan bulog sehingga petani dapat menjual padinya dengan harga yang sesuai.
    - Komunikasi efektif terkait ketersediaan pasokan, rencana pemenuhan pasokan, dan himbauan untuk berbelanja secara bijak untuk menjaga ekspetasi positif bagi masyarakat
    - Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pemkab Bantul, Pemkot Bandar Lampung dan Pemkot Metro dalam rangka Kerjasama antar daerah yang sudah terjalin.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    Dalam rangka pengendalian inflasi daearah diperlukan sinergisitas antara OPD terkait sehingga harga bahan pokok dan penting khususnya dapat terkendali dan terjangkau oleh masyarakat. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

    1. Tim Pengendalian Inflasi daerah, BULOG dan Satgas Pangan perlu terus berkoordinasi dalam memastikan ketersediaan cadangan beras serta keterjangkauan harga komoditas di pasar .
    2. Perlu adanya antisipasi terhadap disparitas harga termasuk komoditas hortikultura antara periode panen yang rendah dengan periode tanam yang tinggi.
    3. Mengantisipasi terjadinya penimbunan bahan pokok dan penting dengan bekerjasama dengan satgas pangan, OPD terkait dan pihak kepolisian.
    4. Mengantisipasi terjadinya kekeringan sawah dalam menghadapi el nino godzila.
    5. Komunikasi terkait ketersediaan pasokan, rencana pemenuhan pasokan, dan himbauan untuk berbelanja secara bijak untuk menjaga ekspetasi positif bagi masyarakat serta menjaga stabilitas harga dengan melakukan operasi sidak pasar.
    6. Perlu ditingkatkan Kerjasama Antar Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta diluar Provinsi dalam rangka peningkatan perekonomian serta mempromosikan produk unggulan dan saling koordinasi tentang kebutuhan pokok yang dibutuhkan daerah masing-masing.
    7. Perlu untuk melakukan pemantauan langsung terhadap program sinergi dengan pemerintah pusat seperti Cetak Sawah Rakyat (CSR) untuk memastikan proses Pembangunan sawah baru berjalan sesuai rencana dalam rangka peningkatan produksi pangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    Rekomendasi Kebijakan pengendalian Inflasi di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

    1. Meningkatkan intensitas koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam hal pemenuhan komoditas pangan strategis menghadapi resiko kenaikan harga.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui TPID dan Satgas Pangan perlu terus

2. melakukan koordinasi baik dengan Bulog maupun stake holder terkait untuk memastikan kembali kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok.
3. Komunikasi terkait ketersediaan pasokan, rencana pemenuhan pasokan, dan himbauan untuk berbelanja secara bijak untuk menjaga ekspetasi positif bagi masyarakat serta menjaga stabilitas harga dengan melakukan operasi sidak pasar.
4. Melakukan pemantauan harga harian dan perbandingan harga dengan daerah lain.
5. Dinas Perindistrian dan Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan TPHP agar dapat melakukan kegiatan Pasar murah serta Pangan Murah secara rutin pada saat terjadi kenaikan harga bahan pokok.
6. Mengoptimalkan Kerjasama antar daerah yang sudah terjalin serta menginisiasi untuk pelaksanaan KAD pada daerah lainnya yang potensial untuk bersama sama meningkatkan perekonomian Masyarakat.
7. Melakukan mitigasi dengan pembuatan titik irigasi, penggunaan pompanisasi, dan Pembangunan embung atau sumur bor.
8. Pemberian bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Gapoktan untuk memperkuat sektor pertanian daerah.
9. Dukungan Pemkab dalam rangka modernisasi pertanian di Kabupaten Lampung Timur melalui penerapan teknologi, perluasan lahan dan program inovatif.